

## Analisis Tantangan Dan Solusi Dalam Anggaran Belanja Daerah

**Jum'iyatul Kamala<sup>1</sup>, Selvi Aulya Salsa<sup>2</sup>, Nurilawati<sup>3</sup>, Wahjoe Pangestoeti<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Januari 9, 2025  
 Revised Januari 10, 2025  
 Accepted Januari 11, 2025

#### Kata Kunci:

Belanja Daerah,  
 Tantangan,  
 Solusi,  
 Keuangan Publik,  
 Akuntabilitas

#### Keywords:

*Local Spending,  
 Challenges,  
 Solutions,  
 Public Finance,  
 Accountability*

### ABSTRAK

Belanja daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering muncul berbagai tantangan yang dapat menghambat penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Penelitian ini membahas berbagai masalah utama dalam belanja daerah, seperti kesulitan dalam perencanaan, birokrasi yang kompleks, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan kurang transparansi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti optimalisasi sistem perencanaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis tantangan dan hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah serta menganalisis solusi yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### ABSTRACT

*Regional expenditure is an important part of public financial management that aims to support regional development and provide services to the community. However, in its implementation, challenges often arise that can hinder the effective and efficient use of the budget. This research discusses the main problems in local expenditure, such as difficulties in planning, complex bureaucracy, lack of competent human resources (HR), and lack of transparency. It also identifies solutions to overcome these challenges, such as optimizing the budget planning system, increasing human resource capacity, utilizing information technology, and strengthening monitoring and accountability mechanisms. With a qualitative approach by analyzing what challenges and obstacles the government faces in managing local budgets and analyzing solutions that can overcome these challenges. The results of this study are expected to provide strategic recommendations for policy makers to improve the quality of local expenditure management that is oriented towards sustainable development and improving community welfare.*

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



***Corresponding Author:***

Jum'iyatul Kamala  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji,  
Kepulauan Riau, Indonesia  
Email: jkamala@student.umrah.ac.id

---

## **1. PENDAHULUAN**

Belanja Daerah merupakan aspek utama dalam manajemen finansial pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi, memaksimalkan mutu layanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan belanja daerah haruslah dijalankan dengan perencanaan yang sangat jelas. Menurut [1] perencanaan berfungsi sebagai salah satu manajemen yang berbentuk proses pengambilan keputusan dari beberapa pilihan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Perencanaan juga merupakan syarat mutlak sebelum suatu kegiatan berlangsung. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka suatu kegiatan yang akan dilaksanakan akan mengalami hambatan, bahkan kemungkinan akan gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas belanja daerah sangat memerangi keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan. Namun, proses pengelolaan belanja daerah kerap ditemui beragam tantangan, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam konteks perencanaan, tantangan utama, mencakup minimnya kurangnya sinkronisasi antara program prioritas dan alokasi anggaran, serta minimnya keterbatasan data yang akurat sebagai landasan pengambilan keputusan.

Dalam fase pelaksanaan, kendala yang sering timbul adalah birokrasi yang rumit, keterlambatan penyerapan anggaran, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola anggaran secara efektif. Selain itu, dalam konteks pengawasan, masalah seperti rendahnya lemahnya transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran kerap menjadi kendala. Berbagai tantangan ini ini bukan hanya menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan solusi yang efektif dan bisa diterapkan. Penelitian ini, bertujuan untuk menelaah tantangan-tantangan utama dalam manajemen belanja daerah, serta menyajikan usulan solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Dengan melalui metode pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari bermacam dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah, sehingga bisa mendukung kemajuan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang biasa digunakan dalam memahami fenomena sosial ataupun masalah tertentu dengan cara menggali arti atau makna, pengalaman, serta pandangan individu atau kelompok dalam konteks atau aspek tertentu. Pendekatan ini menekankan pada proses eksplorasi, deskripsi, dan interpretasi data non-numerik, seperti teks, wawancara, observasi, ataupun dokumen guna memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu isu. dalam [2] dikatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam terkait masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas.

Menurut [3] penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan

untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam anggaran belanja daerah. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam isu-isu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses penyusunan, pengelolaan, implementasi anggaran, serta mengidentifikasi solusi yang relevan dalam mengatasi tantangan tersebut.

Proses analisis akan dilakukan dengan membaca dan mengkaji isi dokumen yang relevan secara sistematis guna mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, seperti regulasi, alokasi yang tidak efektif, atau keterbatasan SDM. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis guna menemukan solusi yang diterapkan, seperti perbaikan mekanisme pengawasan, penguatan kapasitas pengelola anggaran, atau penyesuaian kebijakan fiskal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang menyebabkan kurangnya ekuitas dana sebagai kewajiban suatu daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran Kembali oleh daerah tersebut [4]. Berdasarkan [15] anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam belanja daerah sudah pasti ada pengelolaan anggaran dalam belanja daerah. Pengelolaan anggaran dalam belanja daerah merupakan aspek yang sangat penting atau krusial dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah di daerah Indonesia pasti menghadapi berbagai tantangan yang akan menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan tersebut dan akan mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah. Menurut [6] pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam bagian pemerintahan, dimana hal ini berimplikasi secara langsung terhadap pembangunan dan juga pada kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa tantangan yang biasanya muncul dalam proses anggaran belanja daerah :

1. Kurangnya koordinasi antar Lembaga pengguna anggaran dan tidak efisiennya birokrasi sehingga menjadi hambatan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah.
2. Kemampuan sumber daya manusia yang kurang mumpuni dalam memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern, yang berdampak pada kualitas pengelolaan anggaran. Menurut [7] kualitas sumber daya manusia adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan suatu kegiatan dengan baik yang dapat diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan.
3. Praktik korupsi dan manipulasi anggaran masih menjadi hambatan di beberapa daerah. Hal ini menghambat transparansi dalam pengelolaan keuangan. Menurut [8] transparansi merupakan pemberian pelayanan publik yang harus bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak.
4. Walaupun terdapat otonomi, masih banyak daerah yang bergantung pada dana perimbangan dari pusat, sehingga dapat membatasi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [9].
5. Proses penetapan perda APBD yang terlambat dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, mengakibatkan penyerapan anggaran tidak optimal.

Selain itu, menurut [10] rendahnya realisasi anggaran juga dapat terjadi akibat kurang maksimalnya proses perencanaan, implementasi dan pelaporan terhadap penyerapan anggaran. Masalah tersebut berimplikasi pada serapan yang tidak optimal dan hal tersebut juga berdampak kurang baik bagi

masyarakat karena berarti penyerapan anggaran belanja yang dapat menjadi pembangkit ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal.

Dari beberapa tantangan diatas, ada beberapa solusi yang dapat diberikan yaitu :

1. Mengadakan rapat koordinasi secara rutin antar Lembaga pengguna anggaran guna membahas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat memperkuat komunikasi dan memastikan bahwa seluruh pihak memahami peran dan tanggungjawab mereka dalam pengelolaan anggaran.
2. Mengadakan program pelatihan yang fokus kepada pengelolaan keuangan modern bagi pegawai pemerintah daerah. Hal ini termasuk kursus mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen keuangan yang baik.
3. Meningkatkan sistem pelaporan anggaran yang transparan dan dapat diakses masyarakat secara online untuk meningkatkan kepercayaan publik.
4. Meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dengan sector pariwisata dan pajak daerah guna mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan.
5. Menyederhanakan prosedur penetapan perda APBD agar lebih efisien dengan menetapkan batas waktu yang jelas.

Tak hanya itu, solusi dalam rendahnya realisasi anggaran dapat diatasi dengan cara membuat perencanaan yang matang, implementasi yang benar, serta pelaporan yang dilakukan secara relevan. Menurut [11] perencanaan dalam konteks keuangan berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan, dimana penganggaran harus diarahkan sesuai dengan perencanaan keuangan yang ditetapkan.

Dalam hal ini pemerintah dapat membuat rencana yang jelas agar pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan lancar. Selain itu, peran anggaran kas juga merupakan elemen krusial karena memengaruhi keberhasilan pelaksanaan APBD secara efisien. Anggaran kas tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam mengelola arus kas, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada efektivitas penggunaan dana publik.

Menurut [12] ada beberapa tantangan dan permasalahan yang muncul dalam peran anggaran kas yang perlu diperhatikan yaitu pertama, ketidakjelasan alokasi dana yang dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan. Kedua, penggunaan anggaran yang tidak efisien dapat berdampak pada hasil yang kurang optimal. Ketiga, tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran kas perlu dievaluasi guna memastikan pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Anggaran dalam belanja daerah pasti memiliki tantangan dan hambatan yang akan dilalui dalam proses Menyusun dan mengelolanya. Tantangan tersebut mencakup ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan dana, rendahnya kapasitas perencanaan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan ketergantungan pada transfer dana pusat turut memperumit proses penganggaran. Dalam mengatasi tantangan ini, ada beberapa solusi strategis yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, serta penguatan kerangka kerja yang transparansi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk seluruh kalangan terkait pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dalam pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

#### **REFERENSI**

- [1] Kuntadi, C., & Dian Rosdiana. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review).

- Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152.  
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>
- [2] Putra, H. C., Hukum, P. I., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-Barang Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.30596/japk.v2i2.11016>
- [3] Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- [4] Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- [5] Lontaan, I. C., & Pangerapan, S. (2016). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 4(1), 898–906. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11820/11413>
- [6] Syailendra, M. R., Naftali, K. E., Olivia, A., Winata, A. A., Jakarta, U. T., & Naftali, K. E. (2024). *ANGGARAN DAERAH Corresponding Author* : 4(4), 239–249.
- [7] Yolla, S., & Putri A, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dana Bos. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 636–644.
- [8] Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- [9] Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- [10] Setyaningrum, I., & Sukma Nirwana, N. Q. (2024). Efficiency Challenges Amid Budget Success in Indonesia. *Academia Open*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.21070/acopen.9.2024.8173>
- [11] Artha Aulia, F., & Wibowo Adi, K. (2023). Pengaruh literasi keuangan, perencanaan keuangan, dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan. *Value Added : Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 1–9.
- [12] Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>